

IMPLEMENTASI PEREMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG EVALUASI PERENCANAAN PEMANGUNAN DAERAH DALAM RKPD

Albertus Sandro

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: albertussandrocemox@gmail.com

Abstract: *The national Building in a planned change process is begun from central to district, and on the contrary. Thereby, the ethical dimension which gets an attention is how to evaluate the district building planning is conducted. The kind of research used is qualitative research by the main data sources is of interview outcome by snowball sampling technique. The implementation of Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 about Evaluation of RKPD of Batu City Year 2015 of quarter 2 after linear, but have to increase the affectivity and productivity in a target of performance achievement. Inhibitor factors, i.e, isn't yet maximally the Human Sources training, monetary inflation, isn't yet maximally the supervising, SKPD isn't yet maximal in output also outcome and performance target, isn't yet maximal in preparing toward evaluation system based online.*

Keywords: *implementation, Evaluation, Planning, Building*

Abstrak: Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam suatu proses perubahan yang direncanakan, dimulai dari pusat sampai dengan daerah, dan sebaliknya. Dengan demikian dimensi etis yang mendapat perhatian adalah bagaimana evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data utama adalah hasil wawancara dengan teknik *snowball sampling*. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Evaluasi RKPD Kota Batu Tahun 2015 triwulan 2 sudah linear, namun harus meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam target capaian kinerja. Faktor-faktor pendukung yaitu adanya konsistensi stake holder, tim ahli, ketersediaan data yang mendukung. Faktor-faktor penghambat yaitu belum maksimalnya pelatihan SDM, inflasi mata uang, belum maksimalnya pengawasan, SKPD belum maksimal dalam output serta outcome dan target kinerja, belum maksimal persiapan terhadap sistem evaluasi berbasis online.

Kata Kunci: *Implementasi, Evaluasi, Perencanaan, Pembangunan*

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan dalam suatu negara merupakan tolak ukur dalam kesejahteraan rakyatnya. Melihat Fenomena yang terjadi di negara Indonesia ini maka pentingnya implementasi kebijakan pembangunan yang dijalankan dengan tepat dan akurat. Menurut, Van Meter dan Van Horn dalam Muchlis Hamdi (2014 : 99) mengatakan bahwa implementasi kebijakan mencakup (encompasses) semua tindakan oleh perorangan atau kelompok publik dan privat yang diarahkan pada perwujudan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam keputusan kebijakan. Perencanaan merupakan modal dasar dalam pembangunan.

Menurut Friedman dalam Robinson Tarigan (2015 : 4) Perencanaan adalah cara pikir mengatasi masalah sosial dan ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Agar perencanaan pembangunan berjalan dengan baik tentunya harus disertai pengendalian dan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk melihat fenomena yang terjadi agar dalam setiap fase pembangunan dapat berjalan dengan baik, sehingga menjadi modal dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kedepannya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan perencanaan, juga wajib melakukan evaluasi, yaitu terhadap program perencanaan pembangunan yang sudah dijalankan. Tugas evaluasi ini sesuai dengan Tupoksi yang diamanatkan pada Kepala BAPPEDA Kota Batu atau Tim ahli, Bidang Data Pengendalian dan Pengembangan BAPPEDA Kota Batu dan bidang-bidang lain yang juga melakukan evaluasi pada BAPPEDA kota Batu, dan kemudian evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Implementasi peraturan menteri dalam negeri ini mengamanatkan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan hendaknya, transparansi, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Pernyataan ini terdapat dalam Bab 2 Pasal 4 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

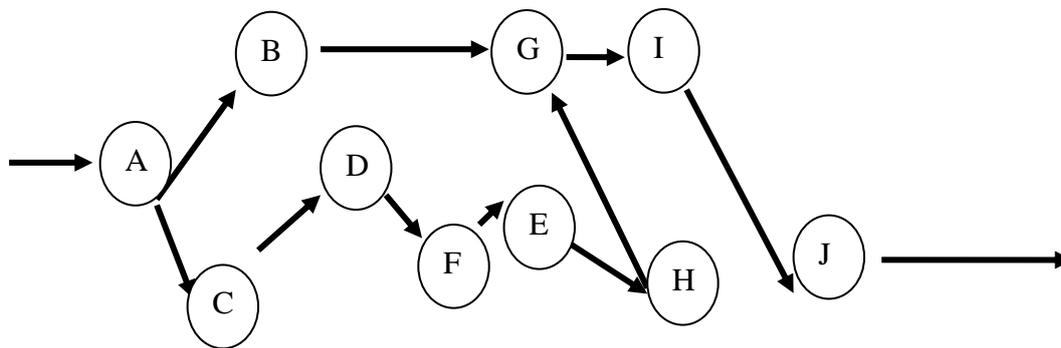
Implementasi Permendagri ini secara keseluruhan juga bertujuan agar hubungan pembangunan pemerintah pusat dan daerah lebih terkendali. Dengan demikian kunci agar hubungan pembangunan pemerintah pusat dan daerah dapat terkendali dengan baik maka sangat penting melakukan evaluasi, baik itu pada tahap Perencanaan Pembangunan, Pengendalian, dan pasca pembangunan, pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam 20 tahun yaitu RPJPD Kota Batu 2005 – 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dalam 5 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2012-2017. Rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) dalam 1 tahun setiap tahun yaitu berpedoman pada target RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kinerja SKPD selama 5 tahun yaitu 2012-2017. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dalam 1 tahun yaitu masing-masing SKPD termasuk BAPPEDA menyusun Renja masing-masing. Sesuai instruksi dari RKPD merupakan turunan dari RKPD dan renstra SKPD 5 tahun lebih mengacu pada kinerja SKPD selama 1 tahun. dalam setiap fase perencanaan sehingga menjadi Pedoman dalam melakukan perencanaan selanjutnya, sehingga saling berkesinambungan, sinergis, dan sinkron antar dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan pembangunan berikutnya.

Pentingnya evaluasi juga terdapat dalam Renja Bappeda Kota Batu (2015:50) menyatakan beberapa permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappeda salah satunya yaitu, kurangnya evaluasi terhadap capaian kinerja Bappeda. Melihat pentingnya Implementasi Kebijakan serta evaluasi hasil pembangunan, yaitu pada Evaluasi terhadap hasil terget capaian kinerja dan perikat kerja perencanaan pembangunan jangka pendek yang akan berdampak pada perencanaan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang, untuk itu saya tertarik untuk meneliti Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah dalam RKPD di BAPPEDA Kota Batu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif menurut Moleong (2012 : 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan pemanfaatan berbagai metode ilmiah dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *snowball sampling* Menurut Sugiyono (2013:218-219) sebagai yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.

Teknik pengambilan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif yang bersifat *snowball* dapat digambarkan seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Teknik *Snowball Sampling*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Derajat Kesesuaian Standar (*Linearitas*)

Pembahasan dalam sudut pandang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dituangkan dalam pasal 281 dan secara teknis dijelaskan dalam lampiran 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, seperti yang disampaikan Kepala sub bagian Program dan Pelaporan Bappeda yaitu Rizaldi, ST.,M.Sc.,M.Eng mengatakan RKPD 2015 sudah selesai dievaluasi kalau alur prosedur evaluasi oleh kepala Bappeda sesuai dengan permendagri nomor 54 tahun 2010 karna birokrasi itu ada pakemnya jalanya harus bertahap jadi setelah nomor 1 harus nomor 2 bukan nomor 3. Selain itu dalam pelaksanaannya RKPD juga harus dinamis dan bisa menyesuaikan kondisi yang ada hal ini juga dipaparkan oleh Kepala sub bagian Program dan Pelaporan Bappeda yaitu Rizaldi, ST.,M.Sc.,M.Eng. bahwa RKPD peka akan perubahan dalam pelaksanaannya ada perubahan jadi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadi perubahan namanya RKPD perubahan yaitu karna pergeseran nilai mata uang. Jadi dari temuan tersebut mengatakan bahwa dalam Dokumen RKPD bersifat dinamis dan peka akan perubahan seperti yang disampaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 pasal 270 Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Dari Pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori *Linearitas* menurut Matland dalam Muchlis Hamdi (2014:104-106) Derajat kesesuaian standar dengan pedoman spesifikasi yang telah ditentukan semakin sesuai maka semakin linear. Sesuai dengan teori tersebut maka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dalam Evaluasi Hasil RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun 2015 Bappeda Kota Batu sudah Linear melakukannya sesuai standar yang ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri.

Efisien Tingkat Pendayagunaan Sumber Daya dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Evaluasi RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

Implementasi Kebijakan menurut Matland dalam Muchlis Hamdi (2014:104-106) Dari beberapa ungkapan tersebut dapat dikatakan bahwa BAPPEDA Kota Batu dalam Efisien Tingkat Pendayagunaan sumber Daya dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Evaluasi RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), yaitu harus meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada Karna dalam berbagai kegiatan masih

membutuhkan tim ahli. Meskipun SDM internal BAPPEDA bukan menjadi hambatan utama dalam melakukan pembangunan.

Produktivitas (Jumlah Capaian Kelompok Sasaran) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Evaluasi RKPD Kota Batu

Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kerja RKPD Kota Batu dalam RKPD Kota Batu Tahun 2015 dari jumlah capaian yaitu sangat rendah berjumlah 23 SKPD, sedang 10 SKPD, dan rendah 3 SKPD. Berdasarkan teori Implementasi Kebijakan menurut Matland dalam Muchlis Hamdi (2014:104-106) Produktifitas berkenaan dengan kemampuan untuk mewujudkan kemampuan standar yang telah ditentukan, terutama yang berupa pencapaian standar jumlah kelompok sasaran, yaitu jumlah pencapaian kelompok sasaran yang berdimensikan produktivitas, berdasarkan standar penilaian realisasi kinerja RKPD Kota Batu tahun 2015 harus meningkatkan produktivitas, hal ini terlihat dari 10 SKPD dengan rata-rata capaian kerja dan predikat kerjanya sedang, 3 SKPD capaiannya rendah dan 23 SKPD capaiannya sangat rendah. Jadi dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang evaluasi RKPD tahun 2015 Berdasarkan data di BAPPEDA Kota Batu Harus Meningkatkan Produktivitas.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun 2015 triwulan 2 Sudah Linear, namun harus meningkatkan efisiensi dan produktivitas yaitu Dari hasil pembahasan data skunder dan data primer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu yaitu sebagai pusat seluruh pembangunan di Kota Batu.

Faktor-faktor Pendukung Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Evaluasi RKPD (Rencana Kerja Pembanguna Daerah) Tahun 2015 Triwulan 2 yaitu adanya Konsistensi stake holder terhadap program yang dibuat, SDM dari tim ahli baik dari praktisi maupun akademisi tergantung program yang dilaksanakan, sumber daya internal BAPPEDA, dana yang ada, dan ketersediaan data yang mendukung. Faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Evaluasi RKPD (Rencana Kerja Pembanguna Daerah) Tahun 2015 yaitu SDM BAPPEDA Kota Batu yang kurang Maksimal, perubahan nilai tukar mata uang dunia (inflasi), kurang maksimal dalam membangun data yang akurat dan update, sinergi terhadap program Nasional masih lemah, jarang pelatihan, SKPD masih kesulitan dalam target capaiannya, belum maksimalnya pengawasan, SKPD masih belum maksimal dalam out put serta out come, belum maksimal persiapan terhadap sistem evaluasi berbasis sistem teknologi informasi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, Dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lexy, Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Tarigan, Robinson. 2015. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010
RKPD KOTA BATU TAHUN 2015
RENJA BAPPEDA KOTA BATU TAHUN 2015